

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat demi mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Salah satu kewenangan tersebut adalah dalam bidang keuangan, dimana pemerintah daerah harus berupaya untuk menggali dan mengembangkan potensi keuangan daerahnya masing-masing.

Otonomi daerah merupakan salah satu cara pemerintah pusat untuk melakukan pengelolaan sepenuhnya terhadap kepemilikan sumber daya yang dimiliki. Daerah diberikan keleluasaan untuk melakukan aktivitas pemerintahan yang bertujuan guna mensejahterakan masyarakatnya. Masing-masing daerah diberikan keleluasaan untuk melaksanakan otonomi merupakan langkah dari pemerintah pusat dalam menyokong tujuan nasional untuk mensejahterakan masyarakat. Tujuan tersebut dapat terwujud dengan adanya sinergi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah (Amalia & Suwarno, 2018). Otonomi daerah merupakan konsep pembangunan ekonomi berbasis desentralisasi di Indonesia, dimana adanya pemberian kewenangan secara luas bagi Pemerintah Daerah (Pemda) guna melakukan pembaharuan terhadap sistem pengelolaan daerah dan anggaran daerah. Penerapan otonomi daerah diharapkan agar setiap daerah dapat menggali dan mengembangkan potensi daerah yang dimiliki sehingga mampu memperoleh pendapatan dan membiayai daerahnya yang akan menentukan keberhasilan penerapan kebijakan otonomi daerah tersebut (Fattah & Irman, 2012). Firman Allah dalam QS. Al-Ahqaaf ayat 19:

وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا ۖ وَيُؤْتِيهِمْ أَعْمَالَهُمْ ۖ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

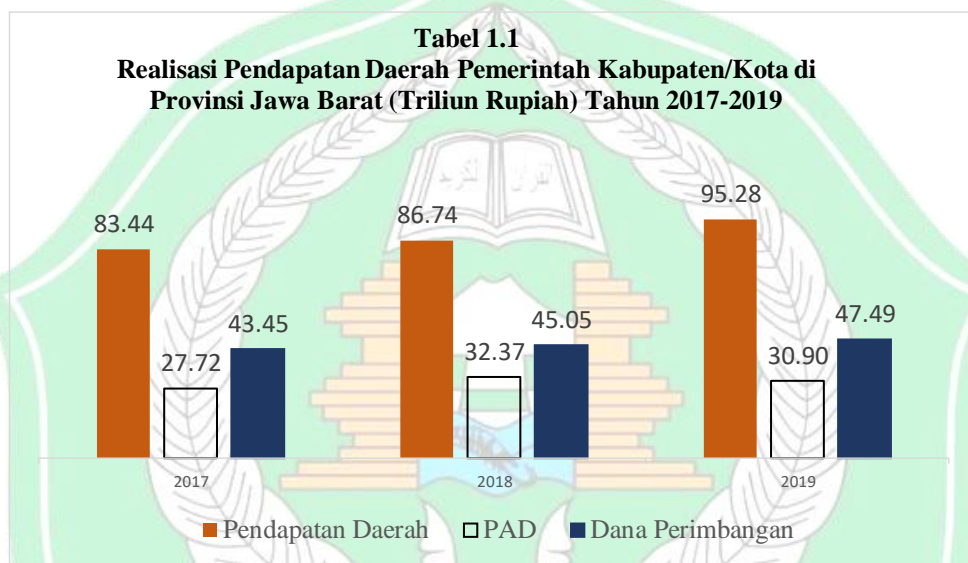
Artinya: “Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada merugikan.”

Dari ayat tersebut diatas dijelaskan bahwasannya Allah pasti akan membalas setiap amal perbuatan manusia berdasarkan apa yang telah mereka kerjakan. Dalam hal ini, jika pemerintah daerah melaksanakan kinerja keuangan dengan baik maka akan mendapatkan hasil yang baik pula dari kinerjanya dan akan memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah tersebut, berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Bab IV mengenai Penyusunan serta Penetapan APBD Pasal 16 menyatakan bahwa “APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun menggunakan Peraturan Daerah, APBD sendiri terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. Pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah, sedangkan belanja daerah dirinci menurut organisasi, fungsi, serta jenis belanja.” Dalam hal ini pemerintah daerah setiap tahunnya harus merencanakan anggaran yang akan diterima selama satu tahun serta anggaran yang akan dikeluarkan selama satu tahun fiskal.

Adanya dana perimbangan dalam otonomi daerah adalah bentuk dari tanggung jawab pemerintah pusat atas berjalannya proses otonomi daerah. Hal ini pula menjadi wujud bahwa walaupun sistem yang diterapkan merupakan sistem otonomi daerah, akan tetapi tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tetapi dalam sisi lain, adanya dana perimbangan yang terlalu besar akan menimbulkan persepsi bahwa wilayah tersebut tidak mandiri secara fiskal serta akan sampai pada konklusi akhir bahwa otonomi daerah tidak efektif untuk dilaksanakan (Fattah & Irman, 2012). Sebagai akibat dari kebijakan desentralisasi maka pemerintah daerah

harus mandiri dalam mengelola keuangan daerah tanpa disertai dana tambahan dari pusat (Dollery, 2009). Dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagian besar daerah memiliki permasalahan yang sama yaitu masih besarnya kontribusi dana perimbangan dibandingkan dengan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang sangat diharapkan guna menopang pelaksanaan otonomi daerah itu sendiri (Mondes, 2016).



Sumber: <https://jabar.bps.go.id> (data diolah peneliti 2022)

Berdasarkan tabel tersebut kontribusi dana perimbangan dalam jangka waktu 3 tahun dari 2017-2019 berjumlah 135.99 triliun, dimana lebih tinggi dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah dengan jumlah 90.99 triliun, sisanya bersumber dari pendapatan lain yang sah. Dengan kata lain, peranan PAD hampir di seluruh kabupaten/kota Jawa Barat yang relatif kecil mencerminkan tingginya tingkat ketergantungan keuangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota terhadap pemerintah pusat, dalam arti lain bahwa pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat belum mandiri secara fiskal, dalam hal ini berarti kebutuhan pembiayaan pengeluaran kabupaten/kota sebagian besar didanai oleh transfer uang dari pemerintah pusat.

Menurut Nanang (2008) dalam (Aziz, 2016) Berkaitan dengan hal tersebut, maka pemerintah daerah harus pandai dalam menyelenggarakan pemerintahannya sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang baik dan adanya evaluasi yang berskala atas capaian daerah dalam kurun waktu tertentu serta merupakan salah satu cara yang digunakan pemerintah daerah dalam mencapai pemerintahan yang baik. Menurut Mahmudi (2006) dalam (Sulistyo, 2018) Dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, kinerja pemerintah sangat penting untuk ditinjau dan diukur. Keberhasilan suatu pemerintah pada era otonomi daerah dapat dilihat dari berbagai ukuran kinerja yang sudah tercapai. Salah satu bentuknya ialah kinerja anggaran. Anggaran adalah komponen penting yang menjadi perhatian publik karena mempunyai peran penting sebagai alat stabilisasi, distribusi, alokasi sumber daya publik, perencanaan, dan pengendalian organisasi, serta penilaian kinerja. Menurut kamus akuntansi manajemen, kinerja (*performance*) diartikan sebagai aktivitas terukur dari suatu entitas selama periode tertentu menjadi bagian dari ukuran keberhasilan pekerjaan. Pengukuran kinerja diartikan sebagai suatu sistem keuangan atau non keuangan dari suatu pekerjaan yang dilaksanakan atau hasil yang dicapai dari suatu kegiatan, suatu proses atau suatu unit organisasi. Sementara, kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang mencakup penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan sistem keuangan yang ditentukan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran (Susanto, 2019).

Dalam mengelola pemerintahannya, daerah memerlukan penilaian untuk melihat apakah pengelolaan keuangan telah dilakukan secara efisien dan efektif dengan cara menilai kinerja pengelolaan keuangan daerah. Penilaian kinerja pengelolaan keuangan tersebut dilakukan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Astuti, 2015). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui serta ditetapkan DPRD melalui peraturan daerah. APBD merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah

daerah. Anggaran daerah menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas, efisiensi, dan efektivitas pemerintah daerah, dan dipergunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan, alat bantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan. Anggaran daerah juga menjadi alat otoritas pengeluaran di masa yang akan datang, ukuran standar untuk penilaian kinerja serta alat koordinasi bagi seluruh kegiatan di berbagai unit kerja. Selain itu, anggaran tersebut bisa digunakan sebagai instrumen kebijakan dan menduduki posisi sentral yang harus memuat kinerja keuangan, baik untuk penilaian secara internal ataupun keterkaitan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi (Syamsudin et al., 2015).

Pengukuran kinerja keuangan daerah dilakukan guna membantu kinerja pemerintah daerah, mengalokasikan sumber daya dan pengambilan keputusan, memperbaiki komunikasi kelembagaan, dan mewujudkan pertanggungjawaban publik (Mardiasmo, 2018). Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dapat menggunakan beberapa rasio, yaitu rasio kemandirian, merupakan kemampuan pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan pemerintah, pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi. Rasio efektivitas, merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang telah direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan realisasi pengeluaran (belanja) dengan realisasi penerimaan daerah (Halim, 2002).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu indikator pengukuran keberhasilan otonomi daerah. Semakin meningkat Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka akan semakin meningkat pula kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhannya sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah dapat dikatakan berhasil dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Begitupun sebaliknya, semakin rendah Pendapatan Asli Daerah dapat menjadi tolak ukur bahwa pemerintah daerah belum berhasil atau mengalami

penurunan dalam penyelenggaraan otonomi daerah (Manueke, 2020). Berikut tingkat pertumbuhan PAD Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat dari tahun 2017 ke tahun 2019:

Tabel 1.2
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2019

Nama Kabupaten/Kota	Pendapatan Asli Daerah (Miliaran Rupiah)		
	2017	2018	2019
Kab. Bogor	2.354,66	3.161,17	2.810,16
Kab. Sukabumi	865,37	819,79	1.260,86
Kab. Cianjur	769,84	928,56	977,00
Kab. Bandung	927,54	1.795,35	1.419,36
Kab. Garut	821,30	1.886,57	874,64
Kab. Tasikmalaya	1.248,42	788,29	505,89
Kab. Ciamis	894,61	664,28	654,19
Kab. Kuningan	703,22	701,4	798,73
Kab. Cirebon	584,81	1.198,42	915,52
Kab. Majalengka	849,97	939,84	790,88
Kab. Sumedang	732,18	563,53	874,43
Kab. Indramayu	919,89	950,06	1.204,69
Kab. Subang	800,76	863,31	1.061,45
Kab. Purwakarta	968,85	720,35	728,08
Kab. Karawang	1.569,57	1.856,32	1.973,35
Kab. Bekasi	2.044,37	2.439,37	2.384,14
Kab. Bandung Barat	722,34	978,09	524,82
Kab. Pangandaran	611,22	514,81	825,28
Kota Bogor	1.012,20	1.215,88	997,02
Kota Sukabumi	672,34	620,95	743,76
Kota Bandung	2.571,59	2.548,26	2.363,78
Kota Cirebon	490,44	734,21	657,21
Kota Bekasi	1.901,15	2.142,15	2.048,91
Kota Depok	1.059,70	1.293,00	1.274,94
Kota Cimahi	535,02	660,96	629,69
Kota Tasikmalaya	480,01	790,97	984,31
Kota Banjar	614,17	600,75	619,43
Total PAD	27.725,54	32.376,64	30.902,52

Sumber: www.djpk.kemenkeu.go.id (data diolah peneliti 2022)

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2017-2019 terjadi fluktuasi setiap tahunnya. Dimana pada tahun 2017 Pendapatan Asli Daerah berjumlah Rp. 27.725,54, kemudian pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp. 4.651,1, akan tetapi mengalami penurunan kembali di tahun 2019 sebesar Rp. 1.474,12.

Dalam kegiatan ekonomi, pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan ekonomi fiskal yang terjadi disuatu negara, seperti penambahan jumlah dan produksi barang industri, perkembangan infrastruktur, penambahan jumlah sekolah, penambahan produksi kegiatan ekonomi yang sudah ada, peningkatan daya beli konsumen dan perkembangan lainnya. Indikator yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi dalam suatu daerah adalah tingkat pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) riil. Pertumbuhan ekonomi dalam suatu daerah dapat diukur dengan cara membandingkan PDRB tahun yang sedang berjalan dengan PDRB tahun sebelumnya (Astuti, 2015). Berikut tingkat pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2019:

Tabel 1.3
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat
Tahun 2017-2019

Tahun	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)
2017	5,33 %
2018	5,66 %
2019	5,07 %

Sumber: <https://jabar.bps.go.id> (data diolah peneliti 2022)

Dari table di atas dapat dilihat bahwa Pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat dari tahun 2017 sampai tahun 2019 yang ditunjukkan oleh laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan 2010, mengalami pertumbuhan pada tahun 2017 sebesar 5,33 persen, pada tahun 2018 sebesar 5,66 persen, dan pada tahun 2020 laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,07 persen.

Semakin besarnya porsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah maka akan semakin mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi (Ani, Putri & Dwirandra, 2014). Berdasarkan data kinerja keuangan pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2017-2019 Pendapatan Asli Daerah masih tergolong relatif kecil dibandingkan dengan dana perimbangan terhadap total pendapatan daerah yang akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Berikut adalah table-table dari riset dan fenomena GAP:



Table 1.4
Research GAP Rasio Kemandirian terhadap Pertumbuhan
Ekonomi

No.	Permasalahan	Hasil Penelitian	Penelitian
1.	Pengaruh rasio kemandirian terhadap pertumbuhan Ekonomi	Kinerja Keuangan yang di ukur dengan menggunakan Rasio Kemandirian berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.	(Kumpangpune et al., 2019)
2.	Pertumbuhan Ekonomi	Kinerja Keuangan yang di ukur dengan menggunakan Rasio Kemandirian berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.	(Astuti, 2015)

Menurut (Kumpangpune et al., 2019) *Kinerja Keuangan* yang di ukur dengan menggunakan Rasio Kemandirian berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun, hal ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Astuti, 2015) yang menunjukkan bahwa *Kinerja Keuangan* yang di ukur dengan menggunakan Rasio Kemandirian berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Table 1.5

Research GAP Rasio Efektivitas terhadap Pertumbuhan Ekonomi

No.	Permasalahan	Hasil Penelitian	Penelitian
1.	Pengaruh Rasio Efektivitas terhadap Pertumbuhan Ekonomi	Kinerja Keuangan yang di ukur dengan menggunakan Rasio Efektivitas berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.	(Nurulita et al.,2018)
2.		Kinerja Keuangan yang di ukur dengan menggunakan Rasio Efektivitas berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.	(Sari et al., 2019)

Menurut (Nurulita et al., 2018) *Kinerja Keuangan* yang di ukur dengan menggunakan Rasio Efektivitas berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun, hal ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Sari et al., 2019) yang menunjukkan bahwa *Kinerja Keuangan* yang di ukur dengan menggunakan Rasio Efektivitas berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Table 1.6

Research GAP Rasio Efisiensi terhadap Pertumbuhan Ekonomi

No.	Permasalahan	Hasil Penelitian	Penelitian
1.	Pengaruh Rasio Efisiensi terhadap Pertumbuhan Ekonomi	Kinerja Keuangan yang di ukur dengan menggunakan Rasio Efisiensi berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.	(Ani, Putri & Dwirandra, 2014)
2.	Pengaruh Rasio Efisiensi terhadap Pertumbuhan Ekonomi	Kinerja Keuangan yang di ukur dengan menggunakan Rasio Efisiensi berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.	(Astuti, 2015)

Menurut (Ani, Putri & Dwirandra, 2014) *Kinerja Keuangan* yang di ukur dengan menggunakan Rasio Efisiensi berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun, hal ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Astuti, 2015) yang menunjukkan bahwa *Kinerja Keuangan* yang di ukur dengan menggunakan Rasio Efisiensi berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

B. Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dalam penelitian ini akan di bagi ke dalam beberapa sub bab yaitu identifikasi masalah, pembatasan masalah dan rumusan masalah, ketiga sub bab tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dikemukakan, maka masalah yang dapat di identifikasikan adalah:

- 1) Adanya penurunan pertumbuhan ekonomi.
- 2) Dana perimbangan lebih besar dibandingkan PAD.
- 3) Kinerja keuangan yang di ukur menggunakan rasio keuangan.
- 4) Rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi.
- 5) Rasio keuangan diukur menggunakan rasio kemandirian, rasio efektivitas, dan rasio efisiensi.

2. Batasan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka peneliti akan membatasi masalah dengan tujuan untuk mencegah pembahasan yang terlalu meluas. Berikut pembahasan masalah penelitian:

- 1) Tema dan fokus penelitian yang diteliti adalah menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi.
- 2) Objek yang diteliti adalah pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2017-2019.
- 3) Alat untuk menganalisis dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif.
- 4) Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis rasio keuangan yaitu rasio kemandirian, rasio efektivitas,

dan rasio efisiensi.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- 1) Apakah rasio kemandirian berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat?
- 2) Apakah rasio efektivitas berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat?
- 3) Apakah rasio efisiensi berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat?
- 4) Apakah rasio kemandirian, rasio efektivitas, dan rasio efisiensi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui bahwa kinerja keuangan pemerintah yang diukur dengan menggunakan Rasio Kemandirian berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat.
- 2) Untuk mengetahui bahwa kinerja keuangan pemerintah yang diukur dengan menggunakan Rasio Efektivitas berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat.
- 3) Untuk mengetahui bahwa kinerja keuangan pemerintah yang diukur dengan menggunakan Rasio Efisiensi berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat.
- 4) Untuk mengetahui bahwa kinerja keuangan pemerintah yang

diukur dengan menggunakan rasio kemandirian, rasio efektivitas, dan rasio efisiensi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu:

1) Bagi penulis

Memberikan pelajaran ataupun wawasan serta jawaban atas permasalahan yang diteliti yaitu mengenai pengaruh kinerja keuangan pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi.

2) Bagi pihak lain

Penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan referensi serta bahan masukan bagi penelitian di masa yang akan datang mengenai Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas, dan Rasio Efisiensi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

D. Sistematika Penulisan

Agar selanjutnya penulisan karya ilmiah ini lebih terarah dan sistematis, maka sistematika penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan membahas dan menguraikan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Dalam bab ini penulis akan membahas dan menguraikan

tentang landasan teori yang dipergunakan, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini penulis akan membahas dan menguraikan tentang objek dan subjek penelitian, populasi dan sampel, operasional variabel, jenis dan sumber data, pendekatan dan jenis penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data dengan menggunakan statistik deskriptif, berbagai uji diantaranya, uji asumsi klasik, uji regresi linear berganda, uji hipotesis dan uji koefisien determinasi.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan membahas dan menguraikan tentang hasil penelitian, hasil analisis data pengujian statistik deskriptif, hasil pengujian asumsi klasik, hasil pengujian regresi linear berganda, hasil pengujian hipotesis, hasil pengujian koefisien determinasi, dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini penulis akan membahas dan menguraikan tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan atas jawaban pertanyaan yang diajukan pada rumusan masalah setelah melalui analisis pada bab sebelumnya. Dan saran dari peneliti mengenai pemasalahan yang diteliti sesuai dengan hasil kesimpulan yang diperoleh.